

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Awal Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rancangan awal rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD Kecamatan Bukit Intan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Akhir Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan Akhir Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023
3. Rancangan Akhir Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

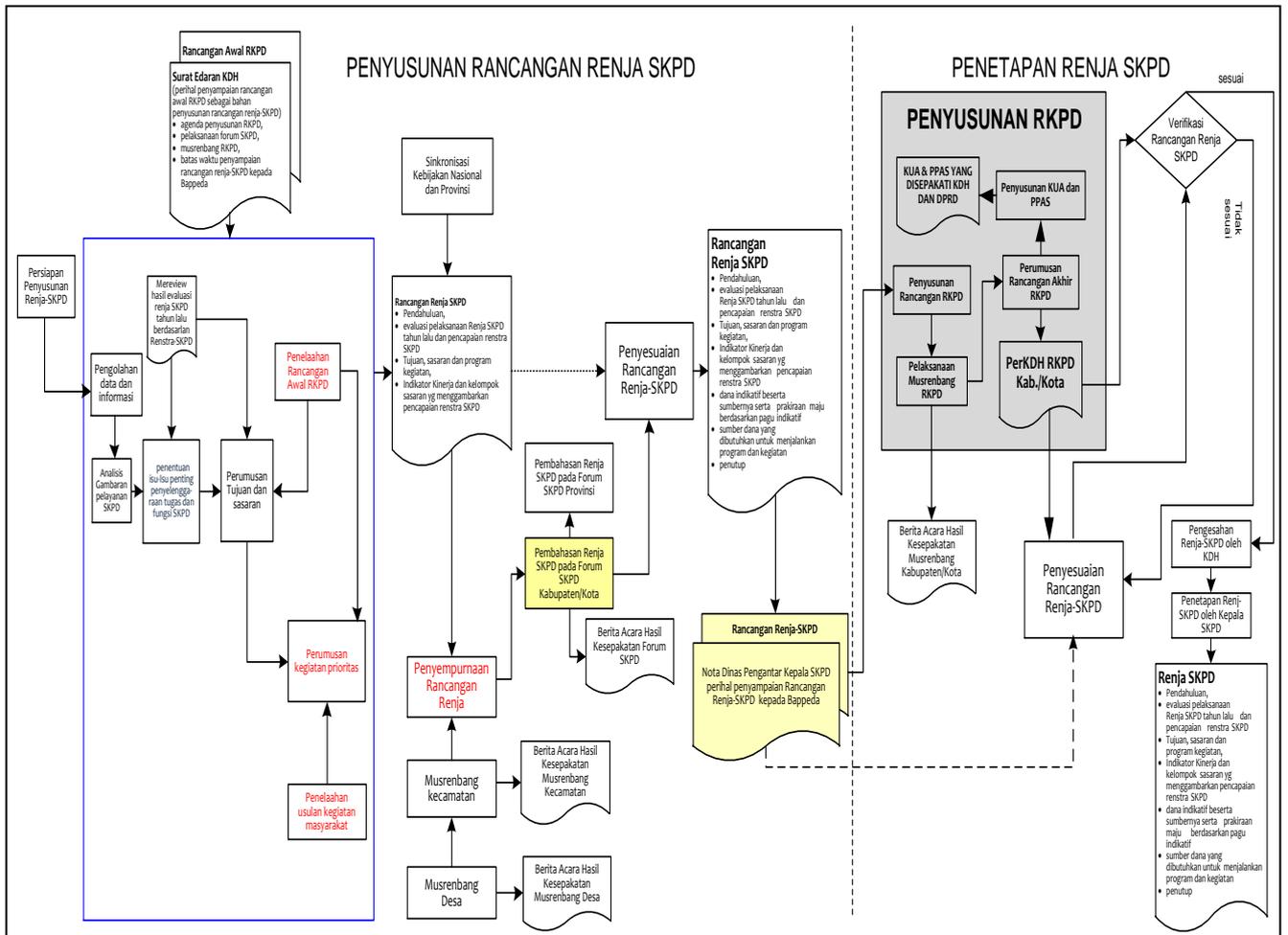
Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Akhir Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Racangan Akhir Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun pertama RPJMD paruh ke dua dari RPJP-D Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dan hasil evaluasi penyelenggaraan RPJMD tahun Racangan Awal Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Racangan Akhir Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar Gambar 1.1  
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Visi SKPD Kecamatan Bukit Intan adalah "Menjadikan Kecamatan Bukit Intan yang beriman, bertaqwa, berbudaya bersatu dalam keragaman, profesionalisme, responsif dan menjadi andalan pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata". Dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan urusan pemerintahan di Tahun 2023 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Bukit Intan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Racangan Akhir Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2023, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 ;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun .
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01).

17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, serta Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2010.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Bukit Intan.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PAS) Tahun 2023.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2023, meliputi :

#### **BAB I       Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

#### **BAB II       Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu**

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

#### **BAB III     Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan**

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan

#### **BAB IV     Penutup**

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Intan sampai dengan Tahun 2022 Tahun Berjalan adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA  
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG  
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Target Kinerja tahun 2021 Program dan Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/kegiatan renja SKPD tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	%		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	99	5.453.084.077	5.372.715.339	98,53			
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	100 %	96	11.279.000	10.814.000	95,88			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun	1 Lap	1	4.273.000	4.094.000	95,81			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Renja (RKT,RKA) yang disusun	1 Lap	1	3.503.000	3.360.000	95,92			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPIP yang disusun	1 Lap	1	3.503.000	3.360.000	95,92			
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	12 %	99	5.441.805.077	5.361.901.339	98,53			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	55 Org	55	5.438.728.077	5.359.560.339	98,54			

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Lap	1	3.077.000	2.341.000	76,08			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>100</b>			
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>100</b>			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang di adakan	3 Stell	3	8.600.000	8.600.000	100			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>98</b>	<b>640.407.940</b>	<b>628.369.737</b>	<b>98,12</b>			
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia</b>	<b>100 %</b>	<b>91</b>	<b>102.162.390</b>	<b>93.413.000</b>	<b>91,44</b>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Unit	5	6.617.500	6.469.000	97,76			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Jenis	4	64.091.390	55.768.000	87,01			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	8	15.335.000	15.335.000	100			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 koran	3	800.000	600.000	75,00			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	5 kali	5	15.318.500	15.241.000	99,49			
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>73</b>	<b>538.245.550</b>	<b>534.956.737</b>	<b>91,44</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan	100 surat	90	10.082.550	9.086.550	90,12			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	4 Unit	4	64.400.000	42.117.480	65,40			

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tertangani	1 Tahun	0	29.963.000	49.952.707	166,71			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Org	0	433.800.000	433.800.000	100,00			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100 %</b>	<b>88</b>	<b>177.632.000</b>	<b>174.495.512</b>	<b>98,23</b>			
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertangani</b>	<b>100 %</b>	<b>98</b>	<b>66.410.000</b>	<b>65.165.000</b>	<b>98,13</b>			
	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan'	3 unit	3	24.240.000	23.480.000	96,86			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	3 unit	3	42.170.000	41.685.000	98,85			
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100 %</b>	<b>98</b>	<b>111.222.000</b>	<b>109.330.512</b>	<b>98</b>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	2 unit	2	22.630.000	22.422.177	99,08			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	1	22.732.000	21.779.335	95,81			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1	65.860.000	65.129.000	98,89			
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>97</b>	<b>675.746.345</b>	<b>656.484.556</b>	<b>97,15</b>			

	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>93</b>	<b>21.896.200</b>	<b>20.376.000</b>	<b>93,06</b>			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Gotong Royong	250 Org	250	21.896.200	20.376.000	93,06			
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>98</b>	<b>646.350.145</b>	<b>636.108.556</b>	<b>98,42</b>			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu	200 Org	200	29.774.100	29.624.100	99,50			
		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Pasir Putih yang terlayani	14 Org	14	89.487.000	88.068.000	98,41			
		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Sinar Bulan yang terlayani	15 Org	15	84.662.015	82.980.615	98,01			
		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Temberan yang terlayani	13 Org	13	82.337.000	82.037.040	99,64			
		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Semabung lama yang terlayani	12 Org	12	88.474.750	87.697.231	99,12			
		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Air Mawar yang terlayani	13 Org	13	92.521.000	90.091.500	97,37			
		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Bacang yang terlayani	14 Org	14	91.900.983	89.401.683	97,28			
		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Air Itam yang terlayani	12 Org	12	87.193.297	86.208.387	98,87			
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>100</b>			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	2 Kegiatan	0	7.500.000	7.500.000	100			

4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun</b>	100	%	99	2.228.725.500	2.197.562.401	98,60			
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase terlaksananya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan</b>	100	%	99	2.228.725.500	2.197.562.401	98,60			
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	150	Org	100	18.200.500	15.360.500	84,40			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah PKK yang dibina	8	PKK	8	44.432.500	38.888.500	87,52			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pasir Putih Yang Terlayani	4	Lembaga	4	309.909.000	308.553.000	99,56			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sinar Bulan Yang Terlayani	4	Lembaga	4	313.743.000	308.672.000	98,38			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Temberan Yang Terlayani	4	Lembaga	4	272.686.800	271.875.800	99,70			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Semabung Lama Yang Terlayani	4	Lembaga	4	377.007.000	373.541.000	99,08			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Air Mawar Yang Terlayani	4	Lembaga	4	249.109.700	248.270.081	99,66			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bacang Yang Terlayani	4	Lembaga	4	319.318.000	316.262.000	99,04			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Air Itam Yang Terlayani	4	Lembaga	4	307.024.000	299.450.270	97,53			
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan Yang di Bina	4	Kelurahan	4	17.295.000	16.689.250	96,50			
5	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti</b>	60	%	0	1.582.092.138	-	0			
	<b>Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>Persentase terlaksananya Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</b>				1.582.092.138					

	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Pasir Putih)				226.032.138					
	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Sinar Bulan)				226.010.000					
	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Temberan)				226.010.000					
	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Semabung lama)				226.010.000					
	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Air Mawar)				226.010.000					
	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Bacang)				226.010.000					
	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Air Itam)				226.010.000					
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>214.888.000</b>	<b>214.888.000</b>	<b>100</b>			
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>214.888.000</b>	<b>214.888.000</b>	<b>100</b>			
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Peserta STQ/MTQ	150 Org	150	214.888.000	214.888.000	150			

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah kota Pangkalpinang Susunan Organisasi Kecamatan Bukit Intan terdiri dari :

- a. Camat Esselon III/a
- b. Sekretaris Kecamatan eselon III/b
  - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian eselon IV/b
  - b. Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan keuangan eselon IV/b
- c. Kasi Tata Pemerintahan Esselon IV/a
- d. Kasi Pembangunan Esselon IV/a
- e. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Esselon IV/a
- f. Kasi Pelayanan Umum Esselon IV/a
- g. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Esselon IV/a

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kecamatan Bukit Intan terdapat beberapa faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi :

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada
2. Tersedianya aparatur yang cukup berkualitas
3. Adanya kesadaran terhadap pentingnya trantib
4. Tersedianya pelayanan Terpadu (PATEN) Kecamatan
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik
6. Tersedianya data umum yang akurat
7. Tersedianya data wajib pajak yang lengkap
8. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan pelayanan yang baik

Kinerja Kecamatan Bukit Intan selama kurun waktu tahun 2019-2023 terdapat pada Tabel sebagai berikut:

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kota Pangkalpinang**

NO	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target indikat or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indek Kepuasan Masyarakat	5		3	3.5	4	4.5	5	3	3,2	4	-	-	3	3,2	4	-	-
2	Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu	100%		80%	85%	90%	100%	100%	65%	80%	80%	-	-	81,25	80%	80%	-	-
3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%		C	CC	B	BB	BB	C	C	C-	-	-	100	C	C-	-	-
4	Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100%		80%	85%	90%	95%	100%	70	80%	85%	-	-	87,5	80%	85%	-	-

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Dalam proses pelaksanaan kegiatan kerja Kecamatan Bukit Intan akan berbenah diri untuk terus dapat meningkatkan kinerja kegiatan, karena itu pengelolaan pemerintahan diperlukan. Penerapan manajemen pemerintahan seluruh pelaksanaan kegiatannya diarahkan pada sebuah proses bagaimana menciptakan efektivitas usaha secara efisien dan produktif dalam penerapan program kerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kecamatan Bukit Intan dalam proses kegiatan program kerja kecamatan juga termaksimalkan fungsi manajemen pemerintahan yang tercakup dalam berbagai aspek perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber daya pemerintahan dan kontrol pemerintahan yang kesemuanya dijalankan dalam koordinasi yang baik. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup pemerintah Kota Pangkalpinang, Kecamatan Bukit Intan memiliki fungsi pelayanan umum dan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku Kecamatan memiliki urusan wajib yaitu: Urusan Pemerintahan umum yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kecamatan Bukit Intan telah menetapkan beberapa langkah pencapaian melalui penetapan program kerja, tujuan maupun sasaran yang semuanya diarahkan pada pencapaian visi dan misi kecamatan secara maksimal. Dalam proses pelaksanaan dilapangan meskipun telah direncanakan dengan baik, berbagai permasalahan timbul yang berpengaruh dalam kegiatan kerja terutama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukit Intan. Permasalahan-permasalahan ini pada akhirnya berdampak pada kurang maksimalnya mekanisme program kerja yang telah direncanakan, dari beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan maupun program kerja kecamatan dan kelurahan yang paling dominan adalah masalah:

#### **a. Disiplin Pegawai**

Hal ini merupakan permasalahan klasik aparaturnya pemerintahan. Masalah disiplin pegawai terutama menyangkut kehadiran pegawai pada jam kantor sehingga akan sangat berpengaruh pada kemampuan pelayanan masyarakat ditingkat kelurahan. Tidak disiplinnya pegawai sering kali menyebabkan proses

pelayanan publik memakan waktu lama karena pegawai yang bertugas dalam suatu urusan tidak berada ditempat.

b. Kurangnya sarana dan prasarana kerja

Dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kecamatan Bukit Intan setiap tahunnya telah melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di kecamatan maupun di kelurahan, baik berupa pengadaan alat-alat pendukung kinerja pelayanan seperti alat-alat elektronik maupun lainnya, dan melakukan pemeliharaan peralatan kantor dan gedung kantor.

Sejalan dengan paradigma yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih menekankan pada otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan.

Kecamatan Bukit Intan sebagai bagian dari satuan kerja Pemerintah Kota Pangkalpinang juga mempunyai paradigma yang sama dimana mengutamakan pelayanan publik yang prima dengan mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu semuanya perlu didukung oleh perencanaan yang matang menyangkut segala hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program kerja kecamatan kedepan, sehingga diperlukan analisi mendalam segala kemungkinan baik peluang maupun tantangan kedepan yang akan menjadi permasalahan bagi program kerja kecamatan kedepan yaitu:

a. Proses rekrutmen dan mutasi pegawai

Proses rekrutmen pegawai yang selama ini diadakan seringkali kurang berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur kecamatan dan kelurahan, hal ini berdasarkan realita dilapangan bahwa penempatan pegawai baru sering tidak menjangkau level kecamatan dan kelurahan dan untuk jangka panjang jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun dengan jumlah pegawai yang baru tidak seimbang, hal ini sangat berpengaruh bagi kecamatan dan kelurahan yang terus mengalami kekurangan pegawai serta tidak bertambahnya pegawai yang berkualitas ditingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu proses mutasi pegawai yang

dilakukan sering kali tidak membawa perubahan yang berarti mengingat pegawai yang dimutasi merupakan pegawai yang “ bermasalah” atau kurang secara etos kerja. Dari semua proses ini tentunya kedepan kecamatan dan kelurahan akan mengalami kesulitan untuk dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal, karena akan selalu mengalami permasalahan yang sama yakni kuantitas dan kualitas pegawai.

b. Koordinasi antar instansi

Permasalahan strategi kedepan yang akan menjadi kendala bagi pelaksanaan kegiatan dan program kerja kecamatan adalah masalah koordinasi antar instansi terkait, mengingat kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan umum saja tapi juga menjalankan fungsi pembangunan, kemasyarakatan dan kesejahteraan. Jadi cakupan kegiatan kecamatan sangatlah luas sehingga kedepan koordinasi dengan instansi terkait akan menjadi permasalahan tersendiri seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kualitas kegiatan masing-masing instansi, hal ini sering menimbulkan tumpang tindih informasi maupun kewenangan karena setiap instansi ingin mencapai target kerjanya masing-masing.

c. Tingkat partisipasi masyarakat

Dalam proses kegiatan pemerintahan maupun program kerja kecamatan terutama yang sangat berkaitan dengan partisipasi masyarakat atau kurang pedulinya masyarakat terhadap program kerja daerah maupun kecamatan. Realita dilapangan kurangnya respon masyarakat ini sebagian besar karena mobilitas masyarakat itu sendiri, tak bisa dipungkiri bahwa alasan ekonomi sering menjadi kendala karena masing-masing sibuk dengan aktivitas sehari-hari, sementara itu kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Hal ini mendorong masyarakat untuk benar-benar efisien memanfaatkan waktu sehingga kurang peduli terhadap lingkungan sekitar.

d. Penguasaan teknologi dan informasi

Keberhasilan kecamatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan perlu dukungan oleh beberapa faktor seperti perencanaan yang matang, pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal, kemampuan finansial maupun penguasaan teknologi dan informasi. Salah satu kunci keberhasilan adalah penguasaan teknologi dan informasi, seperti kita ketahui teknologi dan informasi memegang peranan penting, dimana untuk

membuat suatu perencanaan yang baik kita membutuhkan informasi yang cukup untuk dapat menganalisa data maupun permasalahan yang akan dihadapi dikemudian hari. Dalam proses kegiatan yang dilaksanakan keberhasilan akan sangat ditentukan oleh bagaimana suatu perencanaan telah dipersiapkan dengan maksimal. Sudah menjadi suatu ketentuan bahwa teknologi dan informasi akan selalu berkembang seiring dengan kebutuhan manusia. Untuk aparatur daerah yang tertinggal dalam penguasaan teknologi dan informasi akan mengalami kesulitan dalam menjawab semua tantangan dan dalam memenuhi pelayanan masyarakat dimasa mendatang.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD**

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2023 Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

**REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**  
**OPD KECAMATAN BUKIT INTAN**  
**KOTA PANGKAL PINANG**

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan	
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
				5			
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu.</b>	<b>100%</b>	<b>5.850.474.738</b>	<b>100%</b>	<b>6.196.914.738</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>1 laporan</b>	<b>5.850.474.738</b>	<b>1 laporan</b>	<b>6.196.914.738</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat Daerah.	55 orang	5.850.474.738	55 orang	6.196.914.738
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>712.293.000</b>	<b>100%</b>	<b>712.293.000</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah.</b>	<b>5 Laporan</b>	<b>195.321.800</b>	<b>5 Laporan</b>	<b>195.321.800</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12.000.000	2 Paket	12.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	75.000.000	4 Paket	75.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.000.000	1 Paket	24.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	79.321.800	6 Laporan	79.321.800
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3 laporan</b>	<b>516.971.200</b>	<b>3 laporan</b>	<b>516.971.200</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 unit	26.000.000	8 unit	26.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Orang	440.971.200	18 Orang	440.971.200

1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>87.260.000</b>	<b>100%</b>	<b>87.260.000</b>
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>1 laporan</b>	87.260.000	<b>1 laporan</b>	87.260.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	87.260.000	4 unit	87.260.000
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100%</b>	<b>558.051.600</b>	<b>100%</b>	<b>558.051.600</b>
	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.</b>	<b>2 laporan</b>	<b>25.000.000</b>	<b>2 laporan</b>	<b>25.000.000</b>
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>523.051.600</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>523.051.600</b>
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000
		Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	79.090.800	1 Laporan	79.090.800
		Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	69.126.800	1 Laporan	69.126.800
		Kelurahan Temberan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	74.826.800	1 Laporan	74.826.800
		Kelurahan Semabung lama	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	75.626.800	1 Laporan	75.626.800
		Kelurahan Air Mawar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	71.126.800	1 Laporan	71.126.800
		Kelurahan Bacang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	69.126.800	1 Laporan	69.126.800

		Kelurahan Air Itam	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	69.126.800	1 Laporan	69.126.800
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</b>		<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>10.000.000</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun</b>	<b>100%</b>	<b>3.722.472.800</b>	<b>100%</b>	<b>3.722.472.800</b>
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3.022.472.800</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3.022.472.800</b>
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	15.000.000	7 Lembaga	15.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pkmas/Ormas	40.000.000	7 Pkmas/Ormas	40.000.000
		Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	436.610.400	1 Pokmas/ Ormas	436.610.400
		Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	434.610.400	1 Pokmas/ Ormas	434.610.400
		Kelurahan Temberan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	366.810.400	1 Pokmas/ Ormas	366.810.400
		Kelurahan Semabung lama	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	548.010.400	1 Pokmas/ Ormas	548.010.400
		Kelurahan Air Mawar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	307.410.400	1 Pokmas/ Ormas	307.410.400
		Kelurahan Bacang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	434.010.400	1 Pokmas/ Ormas	434.010.400
		Kelurahan Air Itam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	431.010.400	1 Pokmas/ Ormas	431.010.400
	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	9.000.000

	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>		<b>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>700.000.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>700.000.000</b>
	Penanganan Covid-19 diTingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
			Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
			Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
			Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
			Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
			Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
			Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>240.000.000</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>240.000.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>240.000.000</b>
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	240.000.000	1 Dokumen	240.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>11.170.552.138</b>
							<b>11.516.992.138</b>

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD**

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada tahun 2023 yang telah dilaksanakan merupakan kegiatan lanjutan dan pendukung terhadap Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 adalah *Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM" (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)*. Adapun misi Walikota dan wakil walikota periode 2018-2023 yang terkait dengan Kecamatan Bukit Intan adalah:

MISI ke 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kecamatan yang baik, menuju tercapainya Good Governance

Sasaran : Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

#### **3.2 Program dan Kegiatan**

Adapun Rumusan Rencana Program SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 terlampir dalam Tabel di bawah ini :

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH  
RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023  
KOTA PANGKAL PINANG**

Kode Rekening					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Akhir RKPD		
							Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
							5		
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu.</b>	<b>100%</b>	<b>5.850.474.738</b>	<b>APBD</b>
7	1	01	2.02		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>1 laporan</b>	<b>5.850.474.738</b>	<b>APBD</b>
7	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat Daerah.	55 orang	5.850.474.738	APBD
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>712.293.000</b>	<b>APBD</b>
7	1	01	2.06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah.</b>	<b>5 Laporan</b>	<b>195.321.800</b>	<b>APBD</b>
7	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12.000.000	APBD
7	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	75.000.000	APBD
7	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.000.000	APBD
7	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.000.000	APBD

7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	79.321.800	APBD
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3 laporan</b>	<b>516.971.200</b>	<b>APBD</b>
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>02</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	50.000.000	APBD
7	1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 unit	26.000.000	APBD
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Orang	440.971.200	APBD
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>87.260.000</b>	<b>APBD</b>
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>1 laporan</b>	<b>87.260.000</b>	<b>APBD</b>
7	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	87.260.000	APBD
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100%</b>	<b>558.051.600</b>	<b>APBD</b>
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.</b>	<b>2 laporan</b>	<b>25.000.000</b>	<b>APBD</b>
7	1	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10.000.000	APBD

7	1	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000	APBD
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>523.051.600</b>	<b>APBD</b>
7	1	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000	APBD
7	1	02	2.02	03		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	79.090.800	APBD
7	1	02	2.02	03		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	69.126.800	APBD
7	1	02	2.02	03		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	74.826.800	APBD
7	1	02	2.02	03		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	75.626.800	APBD
7	1	02	2.02	03		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	71.126.800	APBD
7	1	02	2.02	03		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	69.126.800	APBD
7	1	02	2.02	03		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	69.126.800	APBD
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>APBD</b>
7	1	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	10.000.000	APBD

7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun</b>	<b>100%</b>	<b>3.722.472.800</b>	<b>APBD</b>
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3.022.472.800</b>	<b>APBD</b>
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	15.000.000	APBD
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pkmas/Ormas	40.000.000	APBD
7	01	03	2.02	03		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	436.610.400	APBD
7	01	03	2.02	03		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	434.610.400	APBD
7	01	03	2.02	03		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	366.810.400	APBD
7	01	03	2.02	03		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	548.010.400	APBD
7	01	03	2.02	03		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	307.410.400	APBD
7	01	03	2.02	03		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	434.010.400	APBD
7	01	03	2.02	03		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	431.010.400	APBD
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	9.000.000	APBD

7	01	03	2.05		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kelurahan Pasir Putih).</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>700.000.000</b>	<b>APBD</b>
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 diTingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	APBD
7	01	03	2.05	02		Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	APBD
7	01	03	2.05	02		Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	APBD
7	01	03	2.05	02		Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	APBD
7	01	03	2.05	02		Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	APBD
7	01	03	2.05	02		Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	APBD
7	01	03	2.05	02		Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	APBD
7	01	03	2.05	02		Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	APBD
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>240.000.000</b>	<b>APBD</b>
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>240.000.000</b>	<b>APBD</b>
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	240.000.000	APBD
<b>TOTAL</b>								<b>11.170.552.138</b>	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program Kecamatan Bukit Intan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bukit Intan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Kecamatan Bukit Intan sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan untuk mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang baik.

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bukit Intan pada tahun 2022 akan disampaikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BUKIT INTAN TAHUN 2023  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024  
KOTA PANGKAL PINANG**

Kode Rekening					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Akhir RKPD			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
								Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Rp
								5					
7	01				<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu.</b>	<b>100%</b>	<b>5.850.474.738</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>6.435.522.212</b>
7	1	01	2.02		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>1 laporan</b>	<b>5.850.474.738</b>	<b>APBD</b>		<b>1 laporan</b>	<b>6.435.522.212</b>
7	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat Daerah.	55 orang	5.850.474.738			55 orang	6.435.522.212
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>712.293.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>783.522.300</b>
7	1	01	2.06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah.</b>	<b>5 Laporan</b>	<b>195.321.800</b>	<b>APBD</b>		<b>5 Laporan</b>	<b>214.853.980</b>
7	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12.000.000			2 Paket	13.200.000
7	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	75.000.000			4 Paket	82.500.000
7	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.000.000			1 Paket	26.400.000
7	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.000.000			2 Dokumen	5.500.000

7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	79.321.800			6 Laporan	87.253.980
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3 laporan</b>	<b>516.971.200</b>	<b>APBD</b>		<b>3 laporan</b>	<b>568.668.320</b>
7	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	50.000.000			1 Tahun	55.000.000
7	1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 unit	26.000.000			8 unit	28.600.000
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Orang	440.971.200			18 Orang	485.068.320
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>87.260.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>95.986.000</b>
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>1 laporan</b>	<b>87.260.000</b>	<b>APBD</b>		<b>1 laporan</b>	<b>95.986.000</b>
7	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	87.260.000			4 unit	95.986.000
													<b>0</b>
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100%</b>	<b>558.051.600</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>613.856.760</b>
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.</b>	<b>2 laporan</b>	<b>25.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>2 laporan</b>	<b>27.500.000</b>
7	1	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10.000.000			1 Laporan	11.000.000
7	1	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000			1 Dokumen	16.500.000

7	1	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>523.051.600</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>575.356.760</b>
7	1	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000			1 Laporan	16.500.000
7	1	02	2.02	03		Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	79.090.800			1 Laporan	86.999.880
7	1	02	2.02	03		Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	69.126.800			1 Laporan	76.039.480
7	1	02	2.02	03		Kelurahan Temberan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	74.826.800			1 Laporan	82.309.480
7	1	02	2.02	03		Kelurahan Semabung lama	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	75.626.800			1 Laporan	83.189.480
7	1	02	2.02	03		Kelurahan Air Mawar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	71.126.800			1 Laporan	78.239.480
7	1	02	2.02	03		Kelurahan Bacang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	69.126.800			1 Laporan	76.039.480
7	1	02	2.02	03		Kelurahan Air Itam	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	69.126.800			1 Laporan	76.039.480
7	1	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</b>		<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Kegiatan</b>	<b>11.000.000</b>
7	1	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	10.000.000			1 Laporan	11.000.000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun</b>	<b>100%</b>	<b>3.722.472.800</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>4.094.720.080</b>

7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.	3 Laporan	3.022.472.800	APBD		3 Laporan	3.324.720.080
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	15.000.000			7 Lembaga	16.500.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pkmas/Ormas	40.000.000			7 Pkmas/Ormas	44.000.000
7	01	03	2.02	03		Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	436.610.400			1 Pokmas/Ormas	480.271.440
7	01	03	2.02	03		Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	434.610.400			1 Pokmas/Ormas	478.071.440
7	01	03	2.02	03		Kelurahan Temberan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	366.810.400			1 Pokmas/Ormas	403.491.440
7	01	03	2.02	03		Kelurahan Semabung lama	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	548.010.400			1 Pokmas/Ormas	602.811.440
7	01	03	2.02	03		Kelurahan Air Mawar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	307.410.400			1 Pokmas/Ormas	338.151.440
7	01	03	2.02	03		Kelurahan Bacang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	434.010.400			1 Pokmas/Ormas	477.411.440
7	01	03	2.02	03		Kelurahan Air Itam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	431.010.400			1 Pokmas/Ormas	474.111.440
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	9.000.000			1 Laporan	9.900.000
7	01	03	2.05		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>		<b>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>700.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>770.000.000</b>
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 diTingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	110.000.000

7	01	03	2.05	02			Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	<b>110.000.000</b>
7	01	03	2.05	02			Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	<b>110.000.000</b>
7	01	03	2.05	02			Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	<b>110.000.000</b>
7	01	03	2.05	02			Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	<b>110.000.000</b>
7	01	03	2.05	02			Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	<b>110.000.000</b>
7	01	03	2.05	02			Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	<b>110.000.000</b>
													<b>0</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>100%</b>	<b>240.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>264.000.000</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>				<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>240.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>264.000.000</b>
7	01	05	2.01	07		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	240.000.000		1 Dokumen	<b>264.000.000</b>
<b>TOTAL</b>										<b>11.170.552.138</b>			<b>12.287.607.352</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rancangan Awal Rencana kerja dalam koridor perencanaan merupakan instrumen utama yang harus dikedepankan mengingat dokumen tersebut adalah dokumen dasar dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Rancangan Awal Renja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra. Rancangan Awal Renja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tahun 2023 memuat langkah-langkah untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota. Untuk menjaga kesinambungan program kerja, Rancangan Awal Renja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang disusun dalam kerangka pembangunan jangka menengah dengan mencermati pencapaian pada tahun 2021, perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2020. Dalam penyusunannya, Renja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tahun 2023 mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Secara garis besar, rencana kerja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tahun 2023 memuat **4** (Empat) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan)

sub Kegiatan dengan besaran belanja Operasional sebesar **Rp. 11.170.552.138,-** (Sebelas Milyar Seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

Beberapa hal yang dapat menjadi kendala dalam pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tahun 2023 lebih pada aspek teknis. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai yang kurang profesional menjadi kendala yang cukup serius. Kedepan, diharapkan kelemahan-kelemahan tadi dapat ditanggulangi dan dicarikan solusi terbaik. Pelaksanaan dan penyelenggaraan tupoksi agar dapat terus dibenahi dari waktu ke waktu. Selain itu, koordinasi lebih ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Persoalan kapasitas dan kompetensi SDM setidaknya dapat terus ditingkatkan seiring dinamisasi SDM itu sendiri.

Pangkalpinang, Juli 2022

Camat Bukit Intan,

YANSYAH TRI DARMAWAN PUTRA, S.STP  
Pembina Tk.I  
NIP. 198207072001121005